



**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM TATA KELOLA
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA AIR SATAN KECAMATAN
MUARA BELITI KABUPATEN MUSI RAWAS**

Ayub*, Anton Mardoni, Mardi Murahman, Juliman, Abdika Jaya

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Musi Rawas

***Choresponding Author:** ayub_bn@yahoo.com

ABSTRAK

Desa Air Satan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya untuk meningkatkan ketahanan ekonomi desa, memperkuat perekonomian desa dan membangun kemasyarakatan masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat desa. Sebagai badan usaha milik desa, Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan membantu mencari solusi agar BUMDes dapat dikelola secara efektif. Tujuan pendirian BUMDes tidak akan tercapai jika tata kelola BUMDes belum berjalan secara efektif sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes. Tata kelola dan akuntabilitas publik juga melekat pada BUMDes. Melalui tata kelola yang baik, BUMDes diharapkan dapat dikelola secara profesional, mandiri, dan memiliki jaringan yang baik dengan berbagai pihak sehingga dapat terkonsolidasi dan menjadi kekuatan ekonomi pedesaan menuju desa yang mandiri. Penguatan prinsip-prinsip tata kelola melalui tindakan kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel dan sustainable menjadi model yang dikembangkan dalam kegiatan ini

Kata Kunci: Tata kelola, BUMDes, transparansi, akuntabilitas.

ABSTRACT

Air Satan Village is a village located in Muara Beliti District, Musi Rawas Regency. Village-Owned Enterprises (BUMDes) are village business institutions managed by the community and village government in an effort to increase village economic resilience, strengthen the village economy and build community society which is formed based on the needs of the village community. As a village-owned business entity, this community service activity aims to help find solutions so that BUMDes can be managed effectively. The goal of establishing BUMDes will not be achieved if BUMDes governance does not run effectively in accordance with the principles of BUMDes governance. Public governance and accountability are also inherent in BUMDes. Through good governance, BUMDes are expected to be managed professionally, independently, and have good networks with various parties so that they can be consolidated and become a rural economic force towards an independent village. Strengthening governance principles through cooperative, participatory, emancipatory, transparent, accountable and sustainable actions is the model developed in this activity
Keywords: Governance, BUMDes, transparency, accountability.





PENDAHULUAN

Program Pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Joko Widodo salah satu programnya adalah Nawacita dimana pemerintah ditingkat desa Nawacita antara lain menargetkan pengentasan kemiskinan, akses pendidikan dan kesehatan untuk semua, ketahanan pangan, akses energi untuk semua secara berkelanjutan, pembangunan infrastruktur untuk efisiensi dan kemandirian ekonomi dan diberikan kewenangan bagi desanya untuk mengelola secara mandiri daerahnya. Untuk itu pemerintah telah mengucurkan dana desa yang dapat dikelola sendiri oleh desa-desa sebagai upaya untuk membangun dan memperkuat desa. Pemanfaatan dana desa ini diharapkan mampu untuk menjadikan desa desa di Indonesia menjadi maju dan mandiri sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan Negara secara keseluruhan. Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan tercantum pula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2005 tentang Desa. UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa: a) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang disebut BUMDes. b) BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. c) BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penetapan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2021, Kedudukan BUMDes sebagai badan hukum berperan sebagai konsolidator produk, inkubator kewirausahaan masyarakat dan produsen kebutuhan, sehingga BUMDes perlu untuk memiliki tata kelola kelembagaan yang optimal.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. BUMDes sebagai pondasinya, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa dan membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

Desa Air Satan adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas. Wilayah ini terletak sekitar 5 Km dari kampus Universitas Musi Rawas (UNMURA) yang berada di wilayah Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas. Luas wilayah Air Satan 481.74 Ha dengan jumlah penduduk 1772 Jiwa. (Monografi Desa Air Satan 2009) Dari hasil survei yang dilakukan diketahui bahwa penduduk Desa Air Satan pada saat ini sebagian besar mengandalkan hasil-hasil pertanian secara umum seperti bertanam padi, palawija dan beternak. Pemanfaatan dana Desa Air Satan masih belum **sepenuhnya** menyoroti pada pembangunan perekonomian masyarakat desa, namun lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Berbagai faktor diidentifikasi sebagai penyebab perekonomian desa **belum** menjadi prioritas, salah satunya adalah belum siapnya





sumberdaya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni untuk membangun dan menjalankan suatu organisasi yang dapat meningkatkan perekonomian desa (Wahyudi *et al.*, 2018).

Peningkatan perekonomian suatu desa salah satunya dapat dilakukan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes memiliki peran penting dalam menyokong ketahanan ekonomi desa (Widiastuti *et al.*, 2019). Organisasi milik desa yang berbasis ekonomi ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

BUMDes di Desa Air satan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas sebenarnya berstatus aktif, namun belum dapat secara optimal meningkatkan perekonomian desa seperti yang diharapkan pemerintah. Belum berjalannya tata kelola yang baik menjadi salah satu masalahnya. Beberapa hal yang membuat BUMDes di banyak desa tak juga mampu bergerak menjadi mesin pendorong kesejahteraan warga hal itu antara lain: Pemahaman perangkat desa terutama anggota BUMDes mengenai BUMDes masih relatif kurang, Para perangkat desa belum memahami sepenuhnya besarnya wewenang yang dimiliki desa saat ini meski sudah lahir UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Konsep pembangunan desa yang selama ini dipahami masih sebatas pemahaman pembangunan fisik dan atas arahan struktur dari atas, Banyaknya program pemerintah sebelum BUMDes seperti KUD, BUUD dan berbagai program lainnya yang gagal dan tak tentu rimbanya itu membuat sebagian warga desa berpikir bahwa mereka tidak harus mengembalikan dana yang seharusnya menjadi modal bagi usaha desa yang dijalankan BUMDes, Penguasaan kemampuan manajerial yang kurang memadai. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006), tata kelola yang memenuhi kategori prinsip-prinsip *good governance*, yang terdiri dari: transparan, akuntabel, bertanggungjawab, independen dan adil, dapat mengantarkan organisasi mencapai tujuannya dengan baik. Pengelolaan BUMDes yang belum memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik menjadi salah satu penyebab tidak dapat berjalannya lembaga desa ini. Karena itu diperlukan perbaikan atas tata kelola BUMDes di Desa Air Saten Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.

Perangkat desa telah berupaya untuk membangun BUMDes yang ada namun permasalahan pada kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai menjadi kendala yang cukup berarti pada pelaksanaannya. Selanjutnya identifikasi permasalahan mitra di lapangan terkait tata kelola BUMDes menunjukkan permasalahan yang dihadapi adalah : 1. Transparansi dalam pelaksanaan kegiatannya perlu dijaga. 2. Tanggungjawab pelaksanaan kegiatan desa belum terpelihara secara berkesinambungan 3. Akuntabilitas pengelolaan BUMDes belum optimal. 4. Independensi pengelolaan BUMDes optimal. 5. Penerapan kewajaran dan kesetaraan bagi setiap *stakeholder* relatif belum merata.

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh mitra terkait tata kelola BUMDes yang sesuai dengan prinsip *good governance*. Karena itu pengabdian ini akan memberikan masukan terkait tata kelola BUMDes di desa Air satan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut:





- Mampu menjalankan kegiatan BUMDes secara transparan, akuntabel dan terarah untuk menjaga objektivitas.
- Mampu mengelola kegiatan secara baik, seimbang, terukur dan sesuai dengan pemangku kepentingan dalam mhal ini masyarakat desa.
- Mampu mengelola BUMDes secara independen dan tidak diintervensi oleh kepentingan pihak-pihak tertentu.
- Mampu bertanggungjawab dalam menyelenggarakan kegiatan sehingga terjaga *going concern* BUMDes secara berkesinambungan dan menciptakan keadilan sehingga terpelihara kewajaran dan kesetaraan dalam pengelolaannya.

METODOLOGI PELAKSANAAN

METODE

Tahap awal pelaksanaan program pengabdian diawali dengan penyamaan persepsi, koordinasi antara tim pengabdian dengan pemangku kepentingan seperti anggota kelompok BUMDes dan aparat desa setempat. Penyamaan persepsi dilakukan dengan cara sosialisasi program-program yang dibuat agar semua pihak yang terlibat, terutama anggota kelompok BUMDes, dapat memberikan kontribusi yang terbaik dan secara maksimal berperan aktif sehingga implementasi keberlanjutan tata kelola BUMDes pasca program pengabdian yang direncanakan selesai dapat berjalan dengan baik.

Kegiatan ini diawali dengan proses identifikasi area sasaran yakni desa Air Satan, kemudian dilanjutkan dengan observasi dan wawancara langsung dengan warga. Jadwal pelaksanaan program tata kelola BUMDes disusun sesuai dengan rencana dan solusi yang ditawarkan dengan implementasi program sebagai berikut:

- Sosialisasi program tata kelola BUMDes.
- Pelaksanaan penyuluhan tata kelola BUMDes. Peserta diberi bekal teori dengan penyuluhan dan diskusi mulai dari Identifikasi permasalahan BUMDes, perancangan tata kelola sesuai prinsip-prinsip *good governance*, sosialisasi dan pelatihan dilakukan dengan membagikan pengetahuan tentang tata kelola BUMDes yang baik,
- Evaluasi dan pendampingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

GABARAN UMUM WILAYAH DESA AIR SATAN

Desa Air Satan adalah desa yang berada di Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, Indonesia. Pada tahun 2009, Desa Air Satan dimekarkan untuk membentuk Desa Air Lesing. Luas Desa Air Satan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas secara keseluruhan adalah 481,74 Ha.





Secara administratif Desa Air Satan terdiri dari 4 Dusun, dengan batasan-batasan wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Air Lesing,
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lubuk Linggau,
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanah Periuk,
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Satan Indah Jaya.

Luas Wilayah Desa Air satan seluruhnya adalah $\pm 481,74$ Ha dengan jumlah penduduk 1772 jiwa

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan Desa Air Satan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas Prop. Sumatera Selatan. Peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah aparat desa, Masyarakat dan kelompok tani serta beberapa pemuda karang taruna

BUMDes apabila dikelola dengan baik maka akan memberikan dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi desa dan memiliki peran yang penting bagi perekonomian pemerintahan desa serta untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Dengan pengelolaan yang lebih baik, *akuntabel* dan *transparan* maka BUMDes akan mendorong munculnya desa desa mandiri di Indonesia. Peran masyarakat desa yang partisipatif dan semangat gotong royong juga berhasil mendukung BUMDes dalam meningkatkan ekonomi pemerintahan desa.

Sebagai inkubator kewirausahaan masyarakat dan produsen kebutuhan serta menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh masyarakat desa, tata kelola BUMDes juga tunduk pada beberapa prinsip prinsip tata pemerintahan yang baik (*good government governance*) dan tatakelola yang baik (*good corporate governance*). Ardiansyah *et al* (2020) Prinsip-prinsip tatakelola BUMDes, antara lain:

1. *Kooperatif*, adanya partisipasi keseluruhan komponen dalam pengelolaan BUMDes dan mampu saling bekerja sama dengan baik
2. *Partisipatif*, keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDes diharuskan memberikan dukungan serta kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan usaha BUMDes
3. *Emansipatif*, keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan BUMDes diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan, suku, dan agama
4. *Transparan*, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum harus terbuka dan segala lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut
5. *Akuntabel*, keseluruhan kegiatan secara teknis maupun administrative harus dipertanggung jawabkan
6. *Sustainabel*, masyarakat mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha dalam BUMDes.





Melalui BUMDes upaya pemerintah desa dalam rangka menanggulangi kemiskinan dengan memajukan ekonomi desa dapat dikelola dengan profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebutuhan masyarakat dan potensi desa dapat dipertemukan dalam unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh BUMDes. Orientasi BUMDes tidak selalu pada keuntungan, namun dengan adanya BUMDes diharapkan dapat menumbuhkan kembali nilai-nilai sosial lokal dan kepedulian sosial terhadap masyarakat yang kurang beruntung.

Fitriana *et al* (2018) meneliti akuntabilitas pengelolaan dana BUMDes Bersama Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidak sesuaian antara laporan dengan pelaksanaan aktivitas, pencairan dana yang tidak didukung bukti, dan verifikasi laporan tidak dilakukan setiap bulan, yang mengindikasikan bahwa akuntabilitas masih relatif belum berjalan dengan baik. Untuk mewujudkan BUMDes yang sukses, maka dibutuhkan strategi perencanaan dan pijakan yang kuat. Terutama bagi desa yang baru membangun BUMDes. Riset tersebut dapat menyimpulkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan perkembangan BUMDes kurang optimal adalah masalah tata kelola (*Corporate Governance/CG*) BUMDes. Widiastuti *et al* (2019) memberi kontribusi bagi para pegiat BUMDes untuk memberikan pendampingan yang tepat setelah menakar tata kelola yang dimiliki oleh BUMDes.

Hasil kegiatan tata kelola BUMDes di Desa Air Satan didasarkan pada respons peserta sebagai pelaku sangat tertarik terhadap materi pelatihan sesuai dengan sasaran dan metode pelaksanaan. Capaian pelaksanaan pengabdian berupa sosialisasi dan pendampingan, dalam tata kelola BUMDes diukur dari respons kehadiran para peserta. Aktivitas kegiatan ditunjukkan oleh partisipasi dan antusiasme peserta pelatihan dalam diskusi dan berbagi pengalaman, yang direkam dalam foto-foto kegiatan pelatihan sosialisasi (Gambar 1. di bawah ini).





Gambar 1. Sosialisasi tata kelola BUMDes dan diskusi dengan pengurus BUMDes dan perangkat desa Air satan Kabupaten Musi Rawas

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan maka dapat disimpulkan bahwa program pengabdian kepada masyarakat telah terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Pemahaman tentang tugas dan tanggungjawab pengelolaan dan pengawasan melalui struktur organisasi BUMDes menjadi meningkat. Tata kelola BUMDes yang efektif berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola dan pengembangan struktur organisasi menjadi jelas meliputi (Perencanaan, Pengelolaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban).

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian ini merupakan kegiatan yang terprogram dari LPPM Universitas Musi Rawas, sehingga kami ucapkan terima kasih kepada Rektor, Ketua LPPM dan Ketua Program Studi, Dekan FISIP Universitas Musi Rawas beserta Tim, atas bantuan dan kerjasamanya sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Aparatur Pemerintah Desa Air Saten Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas atas kerjasamanya dan izin yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2009. Data Monografi Desa Air Saten Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas Profinsi Sumatera Selatan .
- Buku Pintar Dana Desa. 2017. Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Jakarta
- Fitriana, R. L., Utami, I., & Hapsari, A. N. S. (2018). Pengelolaan dana: Sisi akuntabilitas Badan Usaha Milik Desa. Prosiding Konferensi Regional Akuntansi V (pp. 1–29)





JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT DESA (MASDA)

e-ISSN: 2830-3806

p-ISSN: 2830-0785

LPPM – UNIVERSITAS MUSI RAWAS

Alamat: Jl. Sultan Mahmud Badarrudin II Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I

Kota Lubuklinggau. WA/Hp : 082169365810

<https://ejurnal.unmura.ac.id/index.php/masda>

Email: masdalppmunmura@gmail.com

Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). Pedoman umum *good corporate governance* Indonesia. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014

Permendagri No.111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

Permendagri No.114 tentang Pedoman Pembangunan Desa

